

## Press Release

### **RAPAT KOORDINASI REGIONAL SE-SULAWESI “Membangun Komitmen Bersama untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi”**

Rapat Koordinasi Regional yang dilaksanakan di Aula Perwakilan BPKP Sulsel (27 Januari 2014) ini menindaklanjuti Direktif Presiden RI Tanggal 10 Desember 2013 di Istana Bogor untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi, dan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Direktif Presiden RI Tanggal 15 Januari 2014 yang berlangsung di Kejaksaan Agung.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, diatur tentang 6 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Jangka Menengah, yaitu: pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundangan, Kerjasama Internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, pendidikan dan budaya anti korupsi, dan mekanisme pelaporan. Menurut Kepala BPKP Mardiasmo, Kegiatan ini dimaksudkan memaksimalkan upaya pencegahan serta penindakan pelaku korupsi agar KKN hilang dari negeri ini. Harus diakui, Inspektorat di daerah adalah mitra strategis dalam penanggulangan korupsi di daerah. Selanjutnya, peran Aparat Pengawas Intenal Pemerintah (APIP) akan dikuatkan dan disinergikan dengan Polri, Kejaksaan, dan Mendagri, untuk kemudian disupervisi oleh BPKP. Lebih daripada itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya APIP yang lebih kuat, mandiri, independen, dan lebih professional.

Berkaitan dengan penegakan hukum di daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kepala Daerah. Pertama, terdapat keragu-raguan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugasnya, khususnya berhubungan dengan pengelolaan anggaran. Imbasnya, akan berpengaruh pada penyerapan anggaran yang cenderung menurun sehingga berakibat pada terhambatnya momentum pembangunan di daerah. Kedua, diperlukan langkah cepat dan terpadu dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara sehingga pembangunan berjalan tepat sasaran melalui komitmen bersama mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Untuk itu, forum yang dihadiri oleh Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala BPKP, Mendagri, dan 6 gubernur ini sepakat untuk membentuk sebuah *taskforce* yang dapat menyinergikan komunikasi antara penegak hukum dengan unsur pemda dalam upaya memberikan informasi yang berimbang dan membangun opini masyarakat yang positif mengenai komitmen bersama pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, juga disimpulkan bahwa perlu mempertajam peran APIP yang bersinergi dan berkoordinasi dengan BPKP dan aparat penegak hukum. Tak kalah pentingnya, pertemuan ini juga sepakat

mendesak untuk segera dirumuskan suatu Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan korupsi di daerah. SOP ini nantinya disosialisasikan kepada seluruh jajaran di daerah.